Kementerian Hukum Republik Indonesia **Inspektorat Jenderal**	**Nomor SOPAP:**	ITJ-OT.02.02-64
	Tanggal Pembuatan:	13 juni 2025
	Tanggal Revisi:	13 juni 2025
	Tanggal Efektif:	13 juni 2025
	Disahkan Oleh:	Inspektur Jenderal Dr. Reynhard Silitonga
	Nama SOPAP:	Laporan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Dasar Hukum:	**Kualifikasi Pelaksana:**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. 2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. 4. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum. 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Bisnis Proses. 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 7. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum .	1. Mengetahui dan memahami tugas dan fungsr Sistem dan Prosedur Administrasi Pemerintahan Memahami ketentuan penyusunan Proses Bisnis (PROBIS). 2. Memahami ketentuan penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (SOPAP). 3. Memiliki kemampuan menjalin koordinasi yang baik dengan berbagai pihak. 4. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer. 5. Memiliki kemampuan pengolahan data.
Keterkaitan:	**Peralatan/Perlengkapan:**
	1. Peraturan Perundang-undangan. 2. Komputer, Printer dan Scanner. 3. Jaringan Internet.
Peringatan:	**Pencatatan dan Pendaftaran:**
Apabila PROBIS dan SOP ini tidak ditetapkan maka organisasi tidak memiliki standar yang baku dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.	Di simpan sebagai data secara elektronik dan manual.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

SOP LAPORAN EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN HUKUM

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN
		Inspektur Jenderal	Sekretaris Inspektorat Jenderal	Kepala Bagian PPP	Ketua Tim KRB	Tim KRB	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1.	Menugaskan Sekretaris Inspektorat Jenderal untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum.						Agenda Kerja	15 menit	Disposisi	
2.	Memerintahkan Kepala Bagian PPP untuk menyusun konsep laporan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum.						Disposisi	15 menit	Disposisi	
3.	Memerintahkan Ketua Tim KRB untuk menyusun konsep laporan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum.						Disposisi	15 menit	Disposisi	
4.	Memerintahkan Anggota Tim KRB untuk mengumpulkan bahan laporan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum.						Disposisi	15 menit	Disposisi	
5.	Mengumpulkan dan menyerahkan bahan laporan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan menyerahkan kepada Ketua Tim KRB.						Disposisi	1 hari	Bahan Laporan, Disposisi	
6.	Mengonsep laporan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan menyerahkan kepada Kepala Bagian Program dan Pelaporan.						Bahan Laporan	2 jam	Konsep Laporan, Disposisi	
7.	Memeriksa konsep laporan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum. Jika setuju menyampaikan kepada Sekretaris Inspektorat Jenderal. Jika tidak setuju menyerahkan kepada Ketua Tim KRB untuk diperbaiki.			T Y			Konsep Laporan	1 hari	Konsep Laporan, Disposisi	
8.	Memeriksa konsep laporan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum. Jika setuju menandatangani dan menyerahkan kepada Inspektur Jenderal. Jika tidak setuju mengembalikan kepada Kepala Bagian Perencanaan Program dan Pelaporan untuk diperbaiki.		T				Konsep Laporan	1 hari	Laporan, Disposisi	
9.	Menerima laporan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan menyerahkan kembali kepada Sekretaris Inspektorat Jenderal untuk didokumentasikan.						Laporan, Disposisi	1 jam	Disposisi	
10.	Menyerahkan laporan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum kepada Kepala Bagian Perencanaan Program dan Pelaporan untuk didokumentasikan.						Laporan	10 menit	Disposisi	
11.	Menyerahkan laporan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum kepada Ketua Tim KRB untuk didokumentasikan.						Laporan	10 menit	Disposisi	
12.	Menyerahkan laporan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum kepada Tim KRB untuk didokumentasikan.						Laporan	10 menit	Disposisi	
13.	Mendokumentasikan laporan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum.						Laporan	15 menit	Laporan, Bukti Dokumentasi	

